

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan hukum pidana positif dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak, Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan hukum pidana negara asing dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak, Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur dan cara meminimalisir permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu proses penuntutan merupakan tahapan proses yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah suatu perkara dapat dinyatakan layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. secara umum sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *backbone* dari hukum pidana formil (hukum acara) Indonesia. KUHAP sebagai suatu produk perundang-undangan juga mengandung prinsip atau asas di dalamnya sebagai pedoman atau patokan dalam pelaksanaannya. Kebijakan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia masih mengedepankan penanganan dari aspek hukumnya, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan di Negara Filipina. Persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dapat didekati hanya dengan menggunakan pendekatan hukum semata, namun juga harus menggunakan instrumen pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak, Penuntut Umum seringkali menemui kendala karena sistem perundang undanganya, struktur aparaturnya dan budaya hukumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi sistem peradilan pidana indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan untuk hukum acara yang bersifat khusus seperti sistem peradilan anak

Kata Kunci : Perbandingan, Kebijakan, Hukum Pidana Penuntutan Tindak Pidana Anak

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and explain the positive criminal law policy in the prosecution of child offenders, knowing and describing foreign law criminal law policies in prosecution of child offenders, to find out and examine the problems faced by the public prosecutor in carrying out the task of prosecution of perpetrators of crimes that are still underage and how to minimize these problems.

The research method that will be used is a sociological juridical approach. In order to obtain primary data and accurate secondary data for writing this thesis, data collection is carried out by means of a literature study to find materials related to the principles and rules of law relating to criminal procedural law and the criminal justice system of children. .

Based on the results of this study, the prosecution process is an important process stage in the criminal justice system, because at this stage a case can be declared worthy of being transferred to court or not. in general the Indonesian criminal justice system is regulated in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) as the backbone of Indonesian formal criminal law (procedural law). KUHAP as a legislative product also contains principles or principles in it as a guideline or benchmark in its implementation. The policy of handling children as perpetrators of crimes in Indonesia still prioritizes the management of its legal aspects, this is in contrast to the practices carried out in the Philippines. The problem of children as perpetrators of crimes can not only be approached only by using legal approach, but also must use instruments of social and economic approaches. In carrying out the prosecution of children, the Public Prosecutor often encounters obstacles due to the system of legislation, the apparatus structure and the legal culture. Therefore, it is necessary to reconstruct the Indonesian criminal justice system, so that it can be used as a reference for special procedural law such as the juvenile justice system

Keywords : Comparison, Policy, Criminal Law for Criminal Prosecution of Children